

# **DIASPORA DAN SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH\***

Oleh  
**Nopriyasman\*\***

## **1. Pengantar**

Aktivitas diaspora etnik Minangkabau dalam sejarah pengetahuan masyarakat tingkat awal tergambar dalam *tambo* (historiografi tradisional) Minangkabau. Bukankah *tambo* menyebut bahwa nenek moyang orang Minangkabau itu asal muasalnya bermula dari perpindahan Maharaja Diraja dan rombongan dari Benua Ruhum ? Maharaja Diraja berdiaspora bersama Maharaja Alif, dan Maharaja Depang. Dari *tambo* itu pula diketahui, bahwa berbagai pengalaman perjalanan dan persinggahan nenek moyang orang Minangkabau, telah lama membentuk sub-sub diaspora, sejak terbentuk pemukiman (daerah inti). Sebagaimana yang berlaku umum, daerah inti pertama pemukiman Minangkabau adalah Pariangan, sebuah nagari awal ketika Maharaja Diraja bersama rombongannya turun dari pucak Gunung Merapi. Dari sini kemudian masyarakat mempercayai proses kehidupan nenek moyang mulai bertumbuh dan berkembang biak.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang berkontinuitas menyebabkan kebutuhan akan lahan dan pemukiman pun berkembang, yang tentunya sejalan dengan bertambahnya kebutuhan hidup manusia semakin banyak dan kompleks. Dari kondisional ini, masyarakat bersebar keluar lagi dari pemukiman inti itu, sekaligus menjadi pertanda perluasan daerah kuasa budaya. Masyarakat berdiaspora (merantau), dan bagi Minangkabau wilayah yang

---

\*Makalah Pemantik Diskusi dalam “Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Festival Matrilineal” yang dilaksanakan kerjasama Direktorat Perfilman, Musik dan Media dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat, pada tanggal 8 Februari 2022 di Ruang Rapat Kantor BPNB Provinsi Sumatera Barat, Padang.

\*\*Dr. Nopriyasman, M.Hum adalah Dosen Jurusan Sejarah dan Ketua Prodi Magister Kajian Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Padang.

berkaitan itu disebutnya sebagai Alam Minangkaba, dikenal sebagai wilayah *darek* dan *rantau*. Dalam konteks Alam Minangkabau, *darek* merupakan daerah inti, yang daerahnya meliputi tiga luhak, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota. Sedangkan *rantau* meliputi daerah pemukiman yang dibangun oleh orang Luhak, sehingga masing-masing dari ketiga luhak tersebut mempunyai wilayah rantaunya sendiri.

Sementara, unit pemukiman masyarakat Minangkabau yang tertinggi disebut nagari, dan mempunyai sistem dan struktur pemerintahan, serta aturan sendiri (otonom). Dalam sebuah nagari berdiam berbagai tingkatan dan beberapa kelompok matrilineal, yaitu *paruik* (satu kandungan), payung, dan suku. Secara matrilineal, susunan masyarakat Minangkabau disusun berdasarkan garis ibu, yang keseimbangan sosial ekonominya tetap terjaga bila tanah untuk pertanian masih tersedia dan masih mencukupi masyarakat nagarinya. Dalam kenyataannya, kondisi sosio-ekologis Minangkabau justru menghasilkan pertumbuhan kependudukan yang cepat. Untuk menjaga keseimbangan demografis dan perluasan tanah pertanian, maka orang Minangkabau pun mengalir ke daerah-daerah perbatasan, maka terjadi mobilitas geografis atau perpindahan penduduk sepanjang sejarahnya (Kato 2005: 29-65). Bagaimanakah diaspora matrilineal Minangkabau berlangsung ke berbagai wilayah dalam perspektif sejarah? Makalah ini mencoba menjawab pertanyaan pokok itu, yang ditujukan sebagai pemantik diskusi dalam kegiatan FGD ini..

## **2. Diaspora Matrilineal di Wilayah Sumatera, Indonesia.**

Sebagaimana disinggung dimuka, pembicaraan tentang diaspora berkaitan dengan perpindahan penduduk. Masyarakat diaspora, kata Safran (dikutip dari Anteby dan Berthomiere, 2005: 264) adalah masyarakat atau individu-individu yang mempunyai kebiasaan melakukan perpindahan ke luar negeri asalnya; mempunyai memori kolektif tentang negeri asal; ada “rasa malu” bila selalu berada di negeri asalnya; sadar akan tanah leluhur atau mengagungkan tanah leluhur; tetap melestarikan budaya; serta mempunyai kesadaran dan solidaritas

etnik mereka. Sekurangnya enam hal inilah yang menjadi karakteristik dasar dari masyarakat diaspora.

Bila mengacu pada karesteristik tersebut, maka masyarakat Minangkabau adalah salah satu etnik yang sejak awal memang telah melakukan aktivitas diaspora atau dengan kata lain, masyarakat Minangkabau adalah masyarakat diaspora (yang tersebar ke berbagai wilayah). Belum lagi kalau dihubungkan pada posisi “bujang” (anak laki-laki) dalam sistem matrilineal Minangkabau, maka berdiasporanya orang Minangkabau sekaligus sebagai ajang pembuktian diri untuk menjadi berguna bagi kampung halamannya. Salah satu tempat pembuktian itu adalah di negeri orang, yang dalam sistem sosial Minangkabau dikenal dengan kegiatan merantau (diaspora). Apalagi, di kampungnya, secara tradisional, dunia laki-laki berada disekitaran surau, mesjid, lapau, balai adat, dan dangau (Kato, 2005: 49).

Minangkabau adalah daerah budaya dan bersifat dinamis, dalam arti daerah-daerah dalam pengaruh Minangkabau itu bersifat cair, berubah mengikuti perjalanan zaman. Oleh sebab itu, sesungguhnya daerah budaya Minangkabau melampaui ketentuan daerah administratif Sumatera Barat yang batas-batasnya jelas dan tegas. Versi tambo (historiografi tradisional), perkampungan awal nenek moyang Minangkabau itu bermula di daerah puncak Gunung Merapi, terus turun ke pinggang gunung (Labuhan), ke bawah Guguk Ampang, dan sampai ke baruh bernama Pariangan. Kampung-kampung yang berdekatan disebut *dusun nan berumpuk* (dusun yang bertumpuk). Dalam perkembangannya dusun menjadi koto, sampai kemudian menjadi nagari. Dari daerah-daerah inilah Maharaja Diraja (sang nenek moyang) bersama rombongannya antara lain Suri Dirajo (Penasehat), Indo Jalito (wanita ksatria dan istri raja), dan Cati (orang berilmu) dan kemudian mengatur susunan nagari-nagari selingkungan Gunung Merapi dan Sago (Dt. Nagari Basa, 1966: 6). Gunung Merapi sejak dulu kala menjadi “lambang sejarah” masyarakat Minangkabau dan tempat menata hidup baru, adat, dan undang-undang Minangkabau tingkat awal (Dt. Radjo Penghoeloe, 1982: 61).

Cerita sejarah pengetahuan masyarakat yang dinukilkan tambo tersebut, memperlihatkan mobilitas geografis orang Minangkabau yang berdiaspora, sekaligus memberi informasi pengetahuan kemasyarakatan tentang asal usul orang Minangkabau. Dalam tambo alam atau pun lokal, daerah selingkaran gunung menjadi daerah Luhak Nan Tigo (Tanah Datar, Lima Puluh Koto, dan Luhak Agam). Ketiga luhak (disebut darek) ini menjadi inti budaya Minangkabau. Kato (2005: 68) meinformasikan bahwa wilayah Minangkabau di luar daerah *darek* yaitu *rantau* mempunyai hubungan langsung dengan daerah inti Minangkabau, sebut saja misalnya, rantau Pariaman, Pasaman, dan Kuantan.

Pada umumnya dipercaya, bahwa daerah-daerah Selatan dan Barat Sumatera merupakan daerah perluasan geografis dari rantau Tanah Datar; daerah perluasan Agam mengarah ke Utara dan Barat; sedangkan Limapuluh Kota ke Timur. Selanjutnya Kato menyebutkan bahwa, perpindahan penduduk Minangkabau, dapat pula ditentukan dari penyebaran dan perkembangan jumlah suku masyarakatnya. Realitas ini menjadi bukti adanya kesinambungan hubungan antara darek dan rantau (Kato, 2005: 69-72), baik ketika masih berupa rantau karena pemekaran nagari, sampai kemudian berwujud berupa pemekaran wilayah rantau itu sendiri.

Cara merantau orang Minangkabau biasanya bersifat menyesuaikan dengan keadaan dan kondisional nagari-nagari. Pada tingkatan awal, masa pemekaran nagari, maka pola perantauan orang Minangkabau itu bersifat lingkaran konsentris, seperti penduduk darek pindah ke daerah-daerah pinggiran darek. Daerah-daerah pinggiran darek ini disebut “ikua darek, kapalo rantau” dan wilayah rantau yang berdekatan. Dalam perkembangannya terus bersebar dan pindah ke daerah-daerah yang lebih jauh, yang meliputi daerah bagian Barat sampai ke bagian Timur Pulau Sumatera. Mochtar Naim (1984: 61) menyebutkan bahwa rantau Pesisir sepanjang pantai Barat adalah Sikilang Air Bangis ke Utara, Tiku-Pariaman, Padang, Bandar Sepuluh, Air Haji, Indrapura, Kerinci, dan terus ke Selatan ke Muko-Muko dan Bengkulu. Ke Utara Agam ada rantau Pasaman-Lubuk Sikaping dan Rao sampai ke perbatasan Madahiling. Ke Selatan dan

Tenggara Tanah Datar dikenal juga sebagai daerah *ekor rantau* meliputi Solok-Selayo, Muara Panas, Alahan Panjang-Muara Labuh, Alam Surambi Sungai Pagu, dan Sawahlunto-Sijunjung sampai ke perbatasan Riau dan Jambi. Kemudian ke sebelah Timur (rantau Timur) mencakup daerah-daerah aliran sungai besar, seperti Rokan, Siak, Tapung, Kampar, Indragiri, dan Batanghari. Jadi daerah-daerah rantau itu terbentuk karena memang ada perantau.

Secara politik dan ekonomi, pembentukan wilayah rantau Minangkabau tidak bisa dilepaskan dari adanya aktivitas perdagangan. Daerah-daerah rantau di Pantai Timur merupakan wilayah yang strategis dan berada dalam jalur pelayaran perdagangan antara dunia Barat dan Timur, sekaligus menjadi tempat berdiam para pedagang sambil menunggu pergantian angin monsum baik yang datang dari Barat menuju Timur atau Utara (dan sebaliknya). Ada banyak transportasi sungai yang bisa dilalui, dan sejak abad ke-6 sampai abad ke-14 sudah menjadi daerah-daerah kerajaan yang telah melaksanakan hubungan dagang dengan dunia luar (Naim, 1984: 62; Mansoer, 1970: 37-49).

Pada abad ke 15/16 pusat-pusat politik ekonomi telah berkembang sedemikian rupa di bagian Timur dan Barat Sumatera. Pada waktu itu, sebagai mana yang dicatat Tome Pires wilayah sekitaran Rokan, Siak, Indragiri, Jambi di Pantai Timur, dan kemudian Pariaman dan Tiku di Pantai Barat telah berkembang menjadi pusat-pusat aktivitas perdagangan (Pires, 2014: 192-232). Pantai Barat, pada umumnya berhubungan dengan India, yang juga ada pengaruh angin monsum. Wilayah-wilayah inilah menjadi entreport perdagangan antara dunia luar dengan dunia pedalaman. Sebagai entreport, maka baik pantai Timur atau pun Pantai Barat menjadi daerah tujuan para pedagang dari berbagai pelosok negeri.

Rantau Timur lebih luas dan terbuka serta ada percampuran dengan etnik bangsa lain, misalnya etnik Melayu dan Batak; sedangkan rantau Barat lebih homogen. Rantau Barat berkembang diperkirakan, saat mana pesisir Barat mulai ramai didatangi para pedagang Aceh, sampai didudukinya pelabuhan Padang oleh Belanda tahun 1640. Dengan demikian, perluasan rantau-rantau Minangkabau ke berbagai wilayah di kawasan Sumatera, dan kawasan lainnya berkaitan dengan

ekonomi (penjualan komoditas) hasil daerah, dan faktor politik atau adanya jaminan keamanan bagi para diaspora Minangkabau itu sendiri. Situasi politik dan ekonomi yang terus berdinamika, telah menjadikan orang Minangkabau mengadaptasikan cara merantaunya pada masa-masa periode berikutnya, baik pada masa kolonial sejak pertengahan abad ke-19, maupun masa sesudahnya, setelah berakhirnya kolonialisme, hingga masa hidup di alam kemerdekaan. Mereka tersebar di berbagai wilayah belahan dunia, salah satunya adalah rantau Semenanjung Tanah Melayu, Malaysia.

### **3. Diaspora Minangkabau di Tanah Semenanjung**

Indonesia, khususnya Minangkabau dan Malaysia sering diidentifikasi sebagai budaya serumpun. Hal ini tentu berkaitan dengan realitas praktik budaya yang berlaku pada beberapa negeri di negeri jiran itu, seperti yang berlaku di Negeri Sembilan adalah adat Perpatih, sedangkan Kelantan, Trengganu, Pahang, Perak, Kedah, dan Johor menjadi gambaran berlangsungnya praktik adat Ketumanggungan (Ibrahim 1993: 5). Adat Perpatih dan Adat Ketumanggungan itu dibawa oleh para nenek moyang Minangkabau yang datang ke wilayah ini secara berombongan.

Berdasarkan cerita Tambo (Dt. Toeah, 1985: 168) rombongan pertama dan kedua dipimpin oleh Datuk Raja dari Sungai Tarab. Rombongan ketiga berasal dari Sumanik, yang dipimpin oleh Sultan Sumaik dan Johan Kebesaran. Mereka masuk ke Negeri Sembilan melewati Siak Sri Indrapura, Malaka, dan Rembau, dan dalam periode yang lama. Beberapa kampung seperti Londar Naga (Kampung Galau), dan Tanjung Alam (Gunung Pasir) merupakan hasil bentukan rombongan rombongan ketiga ini. Sebagai rombongan keempat, tercatat di bawah kepemimpinan Datuk Puteh berasal dari Sari Lamak Payakumbuh (Idris, 1970: 19). Hal ini diperkuat oleh pernyataan *teromba* Negeri Sembilan yang menyatakan “beraja ke Johor, Berpangkalan ke Malaka, bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau” (Idris, 1970: 16).

Rombongan-rombongan yang disebut tambo tersebut merupakan kelompok peneruka. Selanjutnya perpindahan penduduk Minangkabau berlangsung secara periodik oleh masyarakat Batuhampar, Sungai Layang, Lubuk Rusa, Bintungan, dan Panyalaian. Para perantau peneruka ini membawa adat istiadat, hukum, norma-norma, nilai-nilai, dan berbagai organisasi sosial tanah asalnya. Masyarakat Johor, Selangor, dan Perak dari dahulu telah didatangi oleh para peneruka pertanian kawasan pesisir, khususnya pesisir Barat dan Timur Sumatera. Bagi bangsa Melayu di Tanah Melayu, Sumatera itu adalah tanah leluhur, dan mereka juga mempercayai bahwa nenek moyang berasal dari keturunan Sriwijaya dan Melayu di Bukit Siguntang Mahamiru (Kling, 2007: 7-9). Sumatera dengan Tanah Semenanjung, dahulu merupakan bahagian dari kesatuan Melayu. Ada beberapa kerajaan dipastikan merupakan inti kerajaan Melayu, khususnya setelah kerajaan Sriwijaya tidak terdengar lagi kuasanya, yaitu Dharmasraya, Jambi, Minangkabau, dan Teba (Muaro Tebo) (Kozok, 2006: 7).

Ada banyak pendukung yang menjadi cerita penguat bagi orang Minangkabau di Semenanjung, bahwa mereka berasal dari negeri Minangkabau, Sumatera bagian Tengah, misalnya dalam cerita geneologi raja-raja dan wewenang memerintah yang mendapat surat pengangkatan dari Minangkabau. Untuk menunjukkan identitas asal muasal kelompok sepesukannya, mereka ditata berdasarkan daerah asal, seperti Suku Batuhampar, Suku Payakumbuh, Suku Mungkal, Suku Seri Malenggang, Suku Seri Lamak, dan Tanah Datar.

Menurut Kling (2007: 8) perantauan orang Minangkabau itu terkait kepada profesinya sebagai pedagang, sebagian lagi terkait kepada jaringan anggota keluarga, dan sebagai kelompok pelarian dari penindasan kuasa Eropa, khususnya Belanda. Motif dagang baru menonjol sejak abad ke-15, sejalan dengan semakin berkembangnya Islam di pelabuhan Malaka. Dalam penelitian Kato (1989: 73) disebutkan bahwa para pedagang Minangkabau mewarnai lalulintas perdagangan pelabuhan Malaka, khususnya dalam kegiatan perdagangan emas, lada hitam, dan tambang timah.

Para pedagang berasal dari orang kaya, penghulu, dan bangsawan (raja) Minangkabau mulai dari Agam, Tanah datar, dan Solok melakukan perdagangan melalui pantai Barat, dan juga melalui aliran sungai menuju kawasan Timur. Pada waktu itu, daerah-daerah kawasan selat Malaka, seperti Malaka, Johor, dan Singapura menjadi pusat-pusat perdagangan. Barang-barang yang berasal dari Minangkabau dibawa menuruni aliran sungai (berjalan kaki), selanjutnya diangkut dengan perahu menuju Penang, Malaka, dan Singapura. Pada tahun 1347 hingga 1795, Sungai Indragiri dan Sungai Kampar termasuk jalan yang aman ditempuh oleh para pedagang emas Minangkabau (Dobbin, 2008: 76-79).

Ketika Belanda berhasil menaklukkan Portugis di Malaka 1641, suhu politik di kawasan Timur menjadi meningkat. Keturunan Minangkabau di negeri Semenanjung meminta ke Pagaruyung agar diutus seorang raja yang menjadi pelindung mereka. Raja Ibrahim (1677-1678) tercatat sebagai raja pertama Negeri Sembilan yang diutus oleh Pagaruyung (Saifullah, 2008: 62), dan menjelang akhir abad ke-18 tercatat pula dua raja yang memerintah Negeri Sembilan, yaitu Raja Kasah dan raja Adil, setelah itu baru era pemerintahan Raja Melewar (Sultan Mahmud).

Raja Melewar memerintah Negeri Sembilan dari tahun 1773-1795, dan digantikan kemudian oleh Raja Hitam, yang juga didatangkan dari Pagaruyung. Pada tahun 1808, Raja Hitam digantikan oleh Raja Lenggang (wafat 1824) dan menjadi raja terakhir yang didatangkan dari Pagaruyung. Sebagai pengganti raja adalah anaknya Tengku Raden, yang kemudian dikenal sebagai Raja pertama Negeri Sembilan. Terhentinya tradisi ini tampaknya terkait kepada situasi di pusat Minangkabau yang tidak kondusif, karena berada dalam suasana bergolak (gerakan kaum paderi sejak 1803), yang akhirnya membawa ikut campurnya kolonial Belanda dalam negeri Minangkabau, yang berlanjut dengan Perang Paderi 1821-1837 (Mansoer, 1970: 69).

Berdasarkan hal itu, maka keterkaitan Pagaruyung secara politik dengan rantau Tanah Semenanjung, khususnya Negeri Sembilan, berlangsung sampai tahun 1809 (dengan sedikit pengecualian pada masa kejayaan Aceh (abad ke-16),

dan sebagian abad ke-17. Keberhasilan Belanda menanamkan dominasi dan hegemoni di Minangkabau sejak pertengahan abad ke-19 berpengaruh pada pola perantau orang Minangkabau ke Malaysia. Asnan (2008) membagi tiga pola utama penjajahan Belanda di Sumatera Barat, yaitu fase ekspansi politik, fase eksploitasi ekonomi, dan fase penetrasi budaya. Dalam ketiga fase tersebut berbagai hal turut memengaruhi berdiasporanya atau berpindahnya penduduk Minangkabau dari suatu wilayah ke wilayah kebudayaan etnik lainnya. Meskipun masa berbeda, namun sifat perantauan orang Minangkabau itu saling berhubungan, meskipun dalam konteks tertentu bisa dijelaskan berdasarkan pada hal-hal tertentu.

Fase ekspansi politik penjajahan kolonial berlangsung sejak dimulainya pembentukan daerah administratif oleh pemerintah kolonial. Wilayah kolonial menjangkau ke daerah pedalaman, baik dilakukan melalui “persetujuan” dengan hegemoni Belanda, maupun secara kekerasan militer (militerisasi), dan juga penerapan birokrasi kolonial. Kelompok masyarakat tertekan sebagai lawan kekuasaan kolonial, seperti kaum paderi, ulama paderi, dan saudagar menjadi kelompok yang menyebar ke luar Minangkabau, termasuk ke Tanah Semenanjung. Daerah tujuan mereka tidak lagi tertuju pada satu tempat (misalnya Negeri Sembilan, sebagaimana sejarah perantauan orang Minangkabau awal, tetapi telah menyebar ke daerah-daerah pusat perdagangan dan pemukiman di wilayah Tanah Semenanjung itu (Asnan, 2008).

Pola kedua bercirikan eksploitasi ekonomi, seperti penerapan kerja rodi atau kebijakan tanam paksa Belanda di beberapa daerah Minangkabau, dan daerah lainnya seperti Madahiling dan Aceh. Masyarakat di pusat-pusat daerah tanam paksa kopi seperti Lubuk Sikaping, Bonjol, Talu, Maninjau, Suliki, Bangkinang, Alahan Panjang, dan Kerinci banyak yang bermigrasi ke luar daerah (Naim, 1984: 81). Faktor lainnya dalam fase kedua itu terkait kepada terbatasnya lahan pekerjaan, “penyelundupan” kopi yang dilakukan para saudagar seperti dari Agam, Limapuluh Kota, dan Tanah Datar (Asnan, dalam Asnan dan Zulkarnain, 2008: 162) melalui jalan setapak hingga hulu sungai besar (Siak, Kampar, dan

Indragiri). Pada waktu itu, perahu menjadi sarana transportasi utama dan daerah tujuan perantuan mereka di Tanah Semenanjung tersebar di berbagai pusat perdagangan. Pada dasawarsa terakhir abad ke-19, Singapura termasuk kota tujuan utama mereka (Asnan, 2008: 163)

Pola penjajahan ketiga, adalah berciri penetrasi budaya dan berlangsung sejak awal abad ke-20 hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Sumatera Barat. Penetrasi budaya yang sangat berpengaruh adalah diperkenalkannya pendidikan sekuler bercorak “Barat”. Pendidikan corak Belanda ini juga membawa perkembangan pada pendidikan Islam moderen. Sebagai akibat lebih lanjut, lahirlah kelompok-kelompok yang berpaham kemajuan, yang kemudian melakukan perubahan dalam praktik keagamaan dan tradisi adat, sehingga terjadi gejolak politik. Pada dekade ketiga abad ke-20, diaspora Minangkabau dimungkinkan terjadi oleh “boom” pertanian (terutama karet) di Riau, Jambi, Sumatera Timur, dan Malaya. Pada periode ini ada sekitar 14.000 orang pergi merantau ke Malaya (Naim, 1984: 86). Masyarakat juga banyak melakukan perantauan sebagai dampak depresi dunia, yang dikenal dengan zaman meleset tahun 1930. Keadaan ini melahirkan pula diaspora Minangkabau yang beragam asal dan statusnya, seperti kaum terpelajar Islam, saudagar, dan ada juga pelarian politik. Daerah tujuan juga beragam, terutama pusat-pusat pemerintahan dan politik atau dikenal juga dengan rantau kota (Asnan, 2008: 164). Setelah itu, gerakan merantau Minangkabau mulai terhenti, akibat revolusi dan kemudian beketetapan bermukim di rantau.

#### **4. Penutup**

Dapat dipahami, adanya kombinasi sistem sosial budaya telah menghadirkan masyarakat Minangkabau menjadi salah satu etnis yang berdiaspora dan ditemukan di banyak tempat. Motivasi perantauan Minang pada akhirnya berkaitan erat dengan upaya mencari ilmu, mencari pangkat (jabatan), dan mencari pith atau harta (perdagangan) (Navis, 1983). Motivasi itu selaras dengan praktik budaya orang Minangkabau tersebut yang dikenal bertipologi

“dinamis” dan “anti parokialisme”. Hal ini terlihat dari sifat mereka yang berjiwa merdeka, kosmopolitan, egaliter, dan berpandangan luas (Chaniago, 2010: 17). Dengan sikap dan sifat seperti itu, para diaspora Minangkabau dapat berkiprah di berbagai daerah, bahkan hingga Malaysia, dan Singapura serta belahan dunia lainnya.

Bagaimanapun, perjalanan sejarah diaspora Minangkabau berdinamika pada setiap masa, konteksnya, serta berhubungan dengan peristiwa dan kejadian-kejadian yang tidak berdiri sendiri. Pada masa republik, diaspora Minangkabau yang juga banyak tercatat dalam sejarah juga tidak luput dipengaruhi dari berbagai faktor demikian, sebut saja misalnya, perang kemerdekaan, dan pergolakan daerah (PRRI), yang memberi arah baru bagi motif perantauan orang Minangkabau. Para diaspora pun era republik dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, saudagar/pengusaha, intelektual, ulama, dan juga politisi.

Berdasarkan studi Mochtar Naim (1984), para diaspora Minangkabau itu tersebar di berbagai pelosok negeri, di kota-kota besar, seperti Medan (Sumatera Utara), Pekanbaru (Riau), Palembang (Sumatera Selatan), Jakarta, Jawa pada umumnya, dan Malaysia, Brunei, dan Singapura, bahkan sampai belahan dunia lainnya, seperti Amerika, Australia, dan sebagainya. Para diaspora Minangkabau ini di luar Ranah Minangkabau dan Macanegara itu memiliki berbagai aktifitas dan profesi, hingga menjadi pemimpin negara dan pemerintahan, tokoh politik, pendakwa (ulama), guru (pendidik), dan wiraswatawan, seperti pedagang, dan pengusaha, dan sebagainya.

Kiprah diaspora Minangkabau memang luas dan menonjol, yang didukung oleh sikap budaya yang terbuka. Keterbukaan itu yang menjadikan para diaspora Minang di rantau selalu membaaur dengan masyarakat tempatan. “Dimana bumi dipijak, di sana langit dijunjung”, suatu ungkapan berkarakteristik masyarakat diaspora, yaitu tradisi merantau, sikap yang kosmopolitan, dan berpandangan luas. Dalam konteks nasional, bahkan internasional, meskipun rantau menjadi panggung tempat berbuat dan mengabdikan, namun ikatan batin dengan tanah kelahiran atau negeri asal tidak pula hendak dilupakan. Semoga !!!

## DAFTAR PUSTAKA

- Anteby, Lisa-Yemini dan Berthomiere, William. 2005, "Diaspora: A Look Back on a Concept", dalam Bulletin du Centre de Recherche Francais a Jerusalem. (Online), 16, 2005 Electronic Version. URL: <http://journal.openedition.org/bcrfj/257>. ISSN: 2075-5287.
- Asnan, Gusti. 2008, "Penjajahan Belanda di Sumatera Barat dan Migrasi Orang Minangabau ke Tanah Semenanjung", dalam Asnan, Gusti dan Zulkarnain, (Ed). 2008. Persembahan 70 Tahun Prof. Suwardi MS Mengabdikan pada Ilmu dan Profesi Sejarah Demi Daerah dan Bangsa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Datoek Nagari Basa, Bahar. 1966. Tambo dan Silsilah Adat Minangkabau. Payakumbuh: C.V. Eleonara.
- Dt. Radjo Penghoeloe, M. Rasjid Manggis. 1982. Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya. Jakarta: Mutiara.
- Datoek Toeah, H. 1985. Tambo Alam Minangkabau. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- Dobbin, Christine. 2008. Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri Minangkabau 1784-1847. Depok: Komunitas Bambu.
- Idris, Abdul Samad. 1970. Hubungan Minangkabau dari Segi Sejarah dan Kebudayaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kato, Tsuyoshi. 2005. Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah (terjemahan Gusti Asnan dan Akiko Iwata). Jakarta: Balai Pustaka
- Naim, Mochtar. 1984. Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau. (Terjemahan Azizah Kassim). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Navis, A.A. 1983. *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial-Politik*. Padang: Genta Singgalang Press.
- Kling, Zainal. 2007, "Keserumpunan Bangsa Melayu Pandangan dari Malaysia", Makalah disampaikan dalam Annual Lecture Mengenang Tokoh Diplomasi Bung Hatta: Apresiasi Perjalanan 50 Tahun Hubungan Diplomatik RIMalaysia. Padang: 19 April
- Kozok, Uli. 2006. Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Naskah Melayu Yang Tertua. Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara-Yayasan Obor Indonesia.

Mansoer, M.D., et.al. 1970. Sedjarah Minangkabau. Jakarta: Bharatara.

Pires, Tome. 2014. *Suma Oriental Perjalanan Dari Laut Merah ke Cina & Buku Fransisco Rodrigues*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Saifullah. 2008. Pertautan Budaya dan Sejarah Minangkabau (Indonesia) dan Negeri Sembilan (Malaysia) Melalui Budaya Merantau dan Peran TokohTokoh Minangkabau di Tanah Semenanjung

Padang, 8 Januari 2022

NP